

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Signaling Theory*

“Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja” (Ghozali, 2020). Menurut Ghozali (2020), “secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk mengetahuinya”. Selanjutnya Ghozali (2020) mengatakan, “apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan”.

“Teori *signal* atau *signaling theory* didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Teori ini berkaitan dengan asimetri informasi yang mana menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi” (Dewi & Soedaryono, 2023). Menurut Nursanita (2019) dalam Dewi & Soedaryono (2023) mengemukakan, “isyarat atau *signal* memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima”.

Menurut pernyataan Brigham & Houston (2020) dalam Dewi & Soedaryono (2023), “isyarat ataupun *signal* yakni suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memberikan arahan kepada investor terkait bagaimana manajemen melihat masa depan perusahaan tersebut”. “Informasi yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor berupa laporan keuangan menjadi sinyal ataupun pengumuman kepada investor tentang status keuangan perusahaan, yang

selanjutnya akan dipakai oleh investor guna keperluan pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan” (Dewi & Soedaryono, 2023).

Menurut Eugenia & Apriwenni (2025), “NPM dipandang sebagai sinyal bagi investor terutama pada kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya, dimana investor akan mentafsirkan sinyal ini untuk mengevaluasi kemungkinan investasi melalui efisiensi perusahaan dalam operasi dan menghasilkan laba yang mencerminkan nilai perusahaan. Semakin tinggi NPM yang dihasilkan perusahaan, semakin kuat pula sinyal positif yang terkirim. NPM mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya keuangannya serta menghasilkan laba dari setiap pendapatan penjualannya. Semakin tinggi NPM, semakin besar pendapatan yang dapat dikonversi menjadi laba. Hal ini berdampak ke arah positif secara langsung pada nilai perusahaan karena mencerminkan tingkat profitabilitas yang tinggi serta prospek pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan NPM yang tinggi biasanya akan dinilai lebih tinggi oleh investor karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang stabil dan konsisten, yang meningkatkan kepercayaan investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan”.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:”

- a. “Aset;”
- b. “Liabilitas;”
- c. “Ekuitas;”
- d. “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;”

- e. “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan”
- f. “Arus kas”

“Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan”.

Menurut Kieso et al. (2024), “unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah sebagai berikut:”

1. “*Asset*”
“Sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi”.
2. “*Liability*”
“Kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.
3. “*Equity*”
“Kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya”.
4. “*Income*”
“Peningkatan aset, atau penurunan kewajiban, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas”.
5. “*Expenses*”
“Penurunan aset, atau peningkatan kewajiban, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam PSAK 201, “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:”

- a. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- b. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- c. “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- d. “Laporan arus kas selama periode;”
- e. “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;”
- f. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “perusahaan menyiapkan lima laporan keuangan dari data akuntansi yang diringkas, yaitu:”

1. “Laporan laba rugi, menyajikan pendapatan dan beban serta laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan untuk periode waktu tertentu”.
2. “Laporan saldo laba, meringkas perubahan laba ditahan untuk periode waktu tertentu”.
3. “Laporan posisi keuangan (kadang-kadang disebut sebagai neraca), melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu”.
4. “Laporan arus kas, meringkas informasi tentang arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu”.
5. “Laporan laba rugi komprehensif, menyajikan item laba komprehensif lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih. Perhatikan bahwa IFRS memuat dua konsep laba: laba bersih dan laba komprehensif”.

Menurut Kieso et al. (2024), “elemen-elemen dalam laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) terdiri dari *asset*, *liability*, dan *equity*. Berikut penjelasannya:”

1. “*Assets*”
 - a. “*Current assets*”

“Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Lima item utama yang terdapat di bagian aset lancar, meliputi: *Inventories, prepaid expenses, receivables, short-term investments, cash and cash equivalents*”.

b. “*Non-current assets*”

“Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset tidak lancar mencakup berbagai macam barang seperti: *Investments, property, plant, and equipment, intangible assets, dan other assets*”.

2. “*Liabilities*”

a. “*Current liabilities*”

“Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau satu tahun yang lebih lama. Konsep ini mencakup:”

I. “Kewajiban yang timbul dari perolehan barang dan jasa: hutang dagang, gaji dan upah yang harus dibayar, pajak penghasilan yang harus dibayar, dan sebagainya”.

II. “Penerimaan di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang belum diterima atau pendapatan langganan yang belum diterima”.

III. “Kewajiban lain yang pelunasannya akan terjadi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti bagian obligasi jangka panjang yang akan dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau kewajiban yang diestimasi, seperti kewajiban garansi”.

b. “*Non-current liabilities*”

“Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang secara wajar tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal yang lebih lama. Sebaliknya, perusahaan mengharapkan untuk membayarnya pada tanggal tertentu

setelah waktu tersebut. Dengan kata lain, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak memenuhi definisi kewajiban jangka pendek. Contoh yang paling umum adalah obligasi yang harus dibayar, wesel yang harus dibayar, pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau satu tahun sebagai kewajiban jangka pendek jika pembayaran kewajiban tersebut memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis:

- I. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang”.
- II. “Kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan”.
- III. “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa mendatang untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti garansi layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut sebagai provisi”.

3. “*Equity*”

“Ekuitas adalah sisa kepemilikan aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan ke dalam kategori-kategori berikut: *Share capital*, *share premium*, *retained earnings*, *accumulated other comprehensive income*, *treasury shares*, dan *non-controlling interest*. Klasifikasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami batasan hukum atau batasan lainnya yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau menggunakan ekuitasnya untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan”.

“Berdasarkan Kieso et al. (2024), “dua elemen utama dalam laporan laba

rugi (*income statement*) adalah sebagai berikut.”

1. “Pendapatan (*income*)”

“Peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik atau pemegang klaim ekuitas. Pendapatan (*income*) mencakup baik pendapatan usaha (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*)”.

a. “Pendapatan usaha (*revenues*)”

“Pendapatan usaha berasal dari aktivitas normal perusahaan dan memiliki berbagai bentuk, seperti penjualan, jasa (*fee*), bunga, dividen, dan sewa”.

b. “Keuntungan (*gains*)”

“Keuntungan merupakan pos lain yang memenuhi definisi pendapatan dan dapat berasal atau tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Contohnya termasuk keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum direalisasi (*unrealized gains*) dari surat berharga yang diperdagangkan”.

2. “Beban (*expenses*)”

“Penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas (pemilik). Beban (*expenses*) mencakup baik beban operasional maupun kerugian (*losses*):”

a. “Beban (*expenses*)”

“Beban umumnya timbul dari aktivitas normal perusahaan dan memiliki berbagai bentuk, seperti harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji dan upah, serta pajak”.

b. “Kerugian (*losses*)”

“Kerugian (*losses*) merupakan pos lain yang memenuhi definisi beban dan dapat berasal atau tidak berasal dari aktivitas normal perusahaan. Kerugian mencakup, misalnya, kerugian akibat restrukturisasi, kerugian dari penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum direalisasi (*unrealized losses*) dari surat berharga yang

diperdagangkan”.

Berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201, “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:”

- a) “Laba rugi;”
- b) “Total penghasilan komprehensif lain;”
- c) “Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain”.

“Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif”.

Berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201, “entitas menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode:”

- a) “Laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:”
 - i. “Kepentingan nonpengendali; dan”
 - ii. “Pemilik entitas induk”.
- b) “Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:”
 - i. “Kepentingan nonpengendali; dan”
 - ii. “Pemilik entitas induk”.

Penghasilan komprehensif lain selama periode menurut IAI (2026) dalam PSAK 201, “entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan”. Selain itu, “entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain:”

- a) “Secara neto dari dampak pajak terkait, atau”

- b) “Sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut”.

“Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi”.

Menurut IAI (2026) dalam PSAK 201, “informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:

- a) “Pos-pos penghasilan komprehensif lain, yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK Indonesia:”
 - i. “Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan”
 - ii. “Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi”.
- b) “Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK Indonesia:”
 - i. “Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan”
 - ii. “Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi”.

Menurut IAI (2026) dalam PSAK 201, “penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dalam komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut harus dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total penghasilan komprehensif”. “Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif

lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait”.

Berikut ini merupakan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201:

KELOMPOK USAHA XYZ Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban Pokok Penjualan	(245.000)	(230.000)
Laba Bruto	145.000	125.000
Penghasilan Lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ²	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ³	(166)	(1.000)
	500	3.000
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan ⁴	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual ⁴	(24.000)	26.667
Lidung nilai atas arus kas ⁴	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ³	4.833	(8.334)
	(14.500)	25.000
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(14.000)	28.000
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	107.250	93.500
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	121.250	65.500
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	21.450	18.700
	107.250	93.500
Laba per saham (dalam rupiah):		
Dasar dan dilusian	0,46	0,30

Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Sumber: IAI 2026

Menurut Kieso et al. (2024), “perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode ke dalam tiga aktivitas berbeda dalam

laporan arus kas (*statement of cash flow*), yaitu aktivitas *operating*, *investing*, dan *financing*, yang didefinisikan sebagai berikut:”

1. “Aktivitas operasi (*operating*) meliputi dampak kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih”.
2. “Aktivitas investasi (*investing*) meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun ekuitas) dan properti, pabrik, dan peralatan”.
3. “Aktivitas pendanaan (*financing*) meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas. Aktivitas ini meliputi: (a) memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberikan pengembalian atas investasi mereka, dan (b) meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam”.

Menurut Kieso et al. (2024), “dalam laporan saldo laba (*retained earnings statement*) laba bersih meningkatkan saldo laba. Sebaliknya, rugi bersih akan menurunkan saldo laba. Baik dividen kas maupun dividen saham akan mengurangi laba ditahan. Perusahaan sering membatasi saldo laba untuk memenuhi persyaratan kontraktual, kebijakan dewan direksi, atau kebutuhan tertentu. Umumnya, perusahaan mengungkapkan jumlah saldo laba yang dibatasi dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan memindahkan jumlah saldo laba yang dibatasi ke akun yang disebut saldo laba yang dicadangkan (*appropriated retained earnings*). Bagian saldo laba dapat menyajikan dua jumlah terpisah, yaitu (1) saldo laba bebas (*unrestricted*), (2) saldo laba yang dicadangkan (*restricted*)”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “pengguna laporan keuangan ada 2 kelompok besar, yaitu:”

1. “Pengguna internal”
“Pengguna internal laporan keuangan adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Ini termasuk manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan”.
2. “Pengguna eksternal”

“Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah sebagai berikut:”

a. “Investor”

“Investor (pemilik) menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham kepemilikan perusahaan”.

b. “Kreditor”

“Kreditor (seperti pemasok dan bankir) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pinjaman uang”.

2.3 Net Profit Margin

Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. “Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Pendapatan, atau kekurangannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan ekuitas” (Weygandt & Kimmel, 2022). Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas antara lain:”

a. “*Profit margin*”

“Mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang penjualan”.

b. “*Asset turnover*”

“Mengukur seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan penjualan”.

c. “*Return on asset*”

“Mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan”.

d. “*Return on ordinary shareholders’ equity*”

“Mengukur profitabilitas investasi pemilik”.

e. “*Earnings per Share (EPS)*”

“Mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa”.

f. “*Price-earnings ratio*”

“Mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham”.

g. “*Payout ratio*”

“Mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai”.

“*Net Profit Margin (NPM)* adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh” (Fitrilia & Nilwan, 2025). Menurut Adwimurti et al. (2023), “*Net Profit Margin* merupakan rasio keuangan yang mengukur profitabilitas suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih dengan pendapatan total. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan yang dilakukannya. Tingginya *Net Profit Margin* menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari penjualan”.

Menurut Lumbantobing et al. (2023), “*Net Profit Margin (NPM)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang memiliki peran penting dalam mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan atau pendapatan”. Menurut Kasmir (2014) dalam Lumbantobing et al. (2023), “semakin tinggi nilai NPM, semakin baik profitabilitas perusahaan, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya”. Lebih lanjut, menurut Hery (2015) dalam Lumbantobing et al. (2023) menyebutkan bahwa, “NPM menginterpretasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam menekan biaya operasional pada periode tertentu. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan yang tinggi dan kemampuan dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Jika NPM menurun, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari penjualan menurun, serta efisiensi dalam menekan biaya operasionalnya kurang baik”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “*Net Profit Margin (NPM)* dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Net Profit Margin : Margin keuntungan bersih

Net Income : Laba bersih perusahaan setelah pajak

Net Sales : Penjualan bersih setelah dikurangi retur dan diskon penjualan

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “laporan laba rugi melaporkan keberhasilan atau profitabilitas operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pengeluaran. Dalam mengukur laba bersih, laporan laba rugi tidak memasukkan transaksi investasi dan dividen antara pemegang saham dan bisnis”.

Menurut Kieso et al. (2024), “komponen dalam laporan laba rugi (*income statement*) meliputi:”

a. “*Sales or Revenue*”

“Menyajikan penjualan, diskon, potongan, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah bersih pendapatan penjualan (*net sales*)”.

b. “*Cost of Goods Sold*”

“Menunjukkan harga pokok penjualan (HPP) yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan tersebut”.

c. “*Gross Profit*”

“Laba kotor didapat dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”.

d. “*Selling Expenses*”

“Melaporkan beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan”.

- e. *“Administrative or General Expenses”*
“Melaporkan beban yang berkaitan dengan administrasi umum perusahaan”.
- f. *“Other Income and Expense”*
“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset (*impairment*), serta biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga sering dilaporkan di bagian ini”.
- g. *“Income from Operations”*
“Pendapatan dari operasi merupakan hasil perusahaan dari operasi normal”.
- h. *“Financing Costs”*
“Bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan. yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga”.
- i. *“Income before Income Tax”*
“Jumlah laba sebelum pajak penghasilan”.
- j. *“Income Tax”*
“Bagian singkat yang menyajikan beban pajak penghasilan atas laba sebelum pajak”.
- k. *“Income from Continuing Operations”*
“Hasil perusahaan sebelum adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan (*discontinued operations*). Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. maka bagian ini tidak disajikan dan jumlah tersebut dilaporkan sebagai laba bersih”.
- l. *“Discontinued Operations”*
“Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan suatu komponen perusahaan”.
- m. *“Net Income”*
“Hasil bersih kinerja perusahaan selama suatu periode waktu”.

n. *“Non-Controlling Interest”*

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepada kepentingan non-pengendali”.

o. *“Earnings per Share”*

“Jumlah per saham yang dilaporkan”.

Menurut Kieso et al. (2024), “komponen-komponen dalam menghitung *net income* di laporan laba rugi meliputi:”

1. *“Sales revenue”*
2. *“Cost of goods sold”*
3. *“Gross profit”*
4. *“Selling expenses”*
5. *“Administrative or general expenses”*
6. *“Other income and expense”*
7. *“Income from operations”*
8. *“Financing cost”*
9. *“Income before tax expense”*
10. *“Income tax”*
11. *“Income from continuing operations”*
12. *“Discontinued operations”*
13. *“Net income”*

Sales revenue		XXX
(-/-) Cost of goods sold		<u>XXX</u>
Gross profit		XXX
Expenses:		
(-/-) Selling expenses	XXX	
(-/-) Administrative expenses	<u>XXX</u>	XXX
(+/-) Other income and expense		<u>XXX</u>
Income from operations		XXX
(-/-) Financing cost		<u>XXX</u>
Income before tax expense		XXX
(-/-) Income tax		<u>XXX</u>
Income from continuing operations		XXX
Discontinued operations:		
(+/-) Income from operations	XXX	
(-/-) Loss on disposal	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Net income		XXX

Gambar 2.2 Perhitungan *Net Income*

Sumber: Kieso et al. (2024)

Menurut Weygandt et al. (2022), “*net income* adalah suatu keadaan ketika pendapatan (*revenue*) melebihi biaya beban (*expenses*) yang dikeluarkan oleh perusahaan”. “Penghasilan (*income*) adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Sedangkan, beban (*expenses*) adalah penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas” (Kieso et al., 2024).

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “*net sales* merupakan pendapatan penjualan (*sales revenue*) dikurangi pengembalian (*sales return*) dan potongan penjualan (*allowances*) serta dikurangi diskon penjualan (*sales discounts*)”. “*Sales*

revenue merupakan sumber pendapatan utama dalam perusahaan perdagangan. *Sales returns and allowances* merupakan transaksi di mana penjual menerima kembali barang dari pembeli (pengembalian) atau memberikan pengurangan harga pembelian (potongan harga) sehingga pembeli akan menyimpan barang tersebut. Sedangkan, *sales discounts* merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebagai imbalan atas pembayaran tepat waktu dalam penjualan kredit” (Weygandt & Kimmel, 2022).

Sales			
Sales revenue			XXX
Less: Sales returns and allowances	XXX		
Sales discounts		<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Net sales			XXX

Gambar 2.3 Perhitungan *Net Sales*

Sumber: Weygandt & Kimmel (2022)

Pada perusahaan sektor properti, “terdapat lima langkah yang harus dilakukan dalam proses pengakuan pendapatan. yaitu.” (Kieso et al., 2024)

1. “Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan”

“Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum”.

2. “Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak”

“Kewajiban pelaksanaan merupakan komitmen perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Komitmen tersebut dapat bersifat eksplisit, implisit, maupun didasarkan pada praktik bisnis yang lazim. Untuk menentukan keberadaan kewajiban pelaksanaan, perusahaan harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan bersifat terpisah bagi pelanggan”.

3. “Menentukan harga transaksi”

“Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang diharapkan akan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai pertukaran atas penyerahan barang atau

jasa. Dalam banyak kontrak, harga transaksi dapat ditentukan dengan mudah karena pelanggan menyetujui pembayaran dalam jumlah tetap dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun, pada kontrak lainnya, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti: (1) imbalan variabel; (2) nilai waktu dari uang; (3) imbalan non-kas; dan (4) imbalan yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada pelanggan”.

4. “Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan yang terpisah”

“Perusahaan sering kali perlu mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Apabila diperlukan alokasi, pembagian harga transaksi tersebut didasarkan pada nilai wajar relatif dari masing-masing kewajiban pelaksanaan. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah harga jual tersendiri (*standalone selling price*), yaitu harga yang akan diterima perusahaan jika barang atau jasa dijual secara terpisah. Jika informasi tersebut tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik atas harga jual barang atau jasa tersebut sebagai unit yang berdiri sendiri”.

5. “Mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi”

“Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa. Pemenuhan tersebut dapat terjadi pada satu titik waktu atau selama periode tertentu. Pendapatan diakui sepanjang waktu apabila: (1) pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seiring pelaksanaan; (2) pelanggan mengendalikan aset yang sedang dibuat; atau (3) aset tidak memiliki alternatif penggunaan bagi perusahaan”.

Dalam sektor properti, terdapat metode pengakuan pendapatan *percentage of completion*. “Metode *percentage of completion* adalah perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah laba kotor yang diakui hingga saat ini dalam akun persediaan (*construction in process*) dan

mengakumulasikan penagihan progres dalam akun kontra persediaan (*billings on construction in process*). Alasan penggunaan akuntansi *percentage of completion* adalah karena dalam sebagian besar kontrak, pembeli dan penjual memiliki hak yang dapat ditegakkan. Pembeli memiliki hak hukum untuk menuntut pelaksanaan spesifik atas kontrak tersebut. Penjual memiliki hak untuk menuntut pembayaran *progress* yang memberikan bukti kepemilikan pembeli. Akibatnya, penjualan berkelanjutan terjadi seiring dengan kemajuan pekerjaan. Perusahaan harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan tersebut” (Kieso et al., 2024).

Lebih lanjut, menurut Kieso et al. (2024), “metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor seiring dengan kemajuan perusahaan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang. Menunda pengakuan hingga seluruh kontrak selesai dapat menyebabkan penyajian yang tidak tepat atas usaha (biaya) dan pencapaian (pendapatan) pada setiap periode akuntansi selama kontrak berlangsung. Agar metode ini dapat diterapkan, perusahaan harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur tingkat kemajuan penyelesaian pada tanggal-tanggal interim tertentu. Masalah utama dalam metode *percentage of completion* adalah kemampuan membuat estimasi yang akurat mengenai tingkat penyelesaian dan laba kotor akhir. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai metode untuk menentukan tingkat kemajuan menuju penyelesaian, namun yang paling umum digunakan adalah metode *cost-to-cost*. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal *costs*, *units*, atau *value added*. Perusahaan mengidentifikasi berbagai ukuran dan mengklasifikasikannya sebagai ukuran *input* atau *output*. Ukuran *input* (biaya yang dikeluarkan, jam kerja) adalah upaya yang dicurahkan untuk suatu kontrak. Ukuran *output* (dengan satuan hasil yang diukur berdasarkan ton yang diproduksi, rantai bangunan yang selesai dibangun, mil jalan raya yang selesai dibangun)”.

Menurut Kieso et al. (2024), “terdapat beberapa rumus yang digunakan dalam metode *percentage of completion* dengan *cost-to-cost basis*, yaitu:”

- a) “Rumus menghitung *percentage of completion*”

$$\frac{\text{Costs Incurred to Date}}{\text{Most Recent Estimate of Total Costs}} = \% \text{ Complete}$$

- b) “Rumus menghitung total pendapatan (atau laba kotor) yang boleh diakui”

$$\text{Percent Complete} \times \text{Est. Total Revenue (or Gross Profit)} = \text{Revenue (or Gross Profit) to Be Recognized to Date}$$

- c) “Rumus menghitung total pendapatan (atau laba kotor) periode sekarang”

$$\text{Rev. to be Recognized to Date} - \text{Rev. Recognized in Prior Periods} = \text{Current-Period Revenue}$$

Dalam Kieso et al. (2024), “berikut merupakan contoh jurnal untuk metode *percentage of completion* dengan pendekatan *cost-to-cost*.”

- 1) “Untuk mencatat biaya konstruksi”

<i>Construction in Progress</i>	xxx	
<i>Materials, Cash, Payable</i>		xxx

- 2) “Untuk mencatat kemajuan penagihan”

<i>Accounts Receivable</i>	xxx	
<i>Billings on Construction in Process</i>		xxx

- 3) “Untuk mencatat penerimaan penagihan”

<i>Cash</i>	xxx	
<i>Accounts Receivable</i>		xxx

- 4) “Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor”

<i>Construction in Process (Gross Profit)</i>	xxx	
<i>Construction Expenses</i>	xxx	
<i>Revenue from Long-Term Contracts</i>		xxx

- 5) “Untuk mencatat penyelesaian kontrak”

<i>Billings on Construction in Process</i>	xxx	
<i>Construction in Process</i>		xxx

Metode pengakuan pendapatan lainnya, yaitu *cost-recovery (zero-profit) method*. “Metode *cost-recovery (zero-profit)* adalah mengakui pendapatan hanya

sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Laba kotor baru diakui setelah seluruh biaya kontrak telah terjadi. Berikut contoh jurnal pengakuan pendapatan menggunakan metode *cost-recovery (zero-profit)*” (Kieso et al., 2024).

1. ”Untuk mencatat pengakuan beban tahun sebelumnya”

<i>Construction expenses</i>	xxx	
<i>Revenue from long-term contract</i>		xxx

2. ”Untuk mencatat pengakuan beban tahun sekarang”

<i>Construction in process (gross profit)</i>	xxx	
<i>Construction expenses</i>	xxx	
<i>Revenue from long-term contract</i>		xxx

3. “Untuk mencatat penyelesaian kontrak”

<i>Billing on construction in process</i>	xxx	
<i>Construction in process</i>		xxx

Berdasarkan laporan keuangan, ”umumnya perusahaan di sektor *Properties & Real Estate* menggunakan dasar PSAK 115 tentang “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dalam pengakuan pendapatan dan beban, di mana pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu. tergantung pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Dalam praktiknya, pendapatan sektor properti umumnya bersumber dari penjualan properti seperti rumah, apartemen (kondominium), perkantoran, serta tanah dan bangunan, yang diakui pada saat pengendalian aset telah dialihkan kepada pelanggan. Selain itu, terdapat pendapatan berulang (*recurring income*) yang berasal dari penyewaan properti investasi, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, gudang dan bangunan komersial, serta dari layanan kepada penyewa, termasuk penyediaan utilitas (listrik, air, dan gas), jasa pengelolaan, dan fasilitas pendukung seperti parkir. Pendapatan lainnya juga dapat berasal dari sektor perhotelan yang dihasilkan dari penyediaan kamar dan layanan tamu hotel, yang diakui pada saat jasa diberikan atau selama tamu menginap. Sementara itu, beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Dalam sektor properti, beban umumnya meliputi beban

pokok penjualan properti yang terdiri dari biaya perolehan tanah dan biaya pembangunan, beban konstruksi, serta beban operasional properti, seperti penyusutan properti investasi, listrik dan air, jasa keamanan dan kebersihan, serta perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, terdapat beban pemasaran dan penjualan, seperti komisi atau jasa perantara (*agent fee*), serta beban umum dan administrasi yang mencakup gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan operasional dan teknis, serta biaya komunikasi, seperti telepon dan internet”.

Sejalan dengan pengakuan beban tersebut. perlakuan atas biaya pinjaman dalam sektor *properties and real estate* mengacu pada PSAK 26 tentang “Biaya Pinjaman”. Berdasarkan standar ini, “biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Dalam praktiknya, hal ini umumnya terjadi pada pembangunan proyek properti seperti apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama. Sementara itu, biaya pinjaman yang tidak terkait langsung dengan pembangunan aset tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya”. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022)

Menurut Kieso et al. (2024), “salah satu pendekatan yang digunakan dalam perlakuan biaya pinjaman adalah hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman aktual yang timbul selama masa konstruksi. Pendekatan ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pinjaman yang timbul melalui pendanaan utang karena biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya untuk membuat aset siap digunakan sesuai tujuannya . Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi pada biaya pinjaman. perusahaan mempertimbangkan aset kualifikasi (*qualifying assets*), periode kapitalisasi (*capitalization period*), dan jumlah yang dikapitalisasi (*amount to capitalize*)”.

“Aset kualifikasi merupakan aset yang membutuhkan periode waktu yang signifikan agar siap digunakan sesuai tujuannya atau dijual, seperti bangunan, pabrik, mesin besar, serta aset yang ditujukan untuk dijual atau disewakan yang membutuhkan periode waktu yang signifikan untuk diproduksi. Sementara itu,

periode kapitalisasi merupakan jangka waktu perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dimulai ketika pengeluaran untuk aset sedang terjadi, aktivitas pembangunan sedang berlangsung, dan biaya pinjaman sedang timbul, serta berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi bergantung pada apakah perusahaan menggunakan utang spesifik (*specific debt*) yang ditarik untuk mendanai proyek atau menggunakan kewajiban utang umum (*general debt obligations*) perusahaan” (Kieso et al., 2024).

“Berikut merupakan contoh jurnal untuk mencatat biaya pembangunan aset yang terjadi:” (Kieso et al., 2024)

<i>Building / Construction in Process</i>	xxx
<i>Cash / Payable</i>	xxx

“Berikut merupakan contoh jurnal kapitalisasi biaya pinjaman berdasarkan sumber pendanaannya:” (Kieso et al., 2024)

1. “Sumber pendanaan dengan menggunakan *specific debt*”

a. “Untuk mencatat kapitalisasi biaya pinjaman”

<i>Building (Capitalized Borrowing Cost)</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

b. “Untuk mencatat pendapatan investasi yang diperoleh dari investasi sementara atas dana pinjaman yang belum digunakan”

<i>Cash</i>	xxx
<i>Building (Capitalized Borrowing Cost)</i>	xxx

2. “Sumber pendanaan dengan menggunakan *general debt*”

a. “Untuk mencatat biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan beban bunga”

<i>Building (Capitalized Borrowing Cost)</i>	xxx
<i>Interest Expense</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

3. “Sumber pendanaan dengan menggunakan kombinasi *specific debt* dan *general debt*”

a. “Untuk mencatat biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan beban bunga”

<i>Building (Capitalized Borrowing Cost)</i>	xxx	
<i>Interest Expense</i>	xxx	
<i>Cash</i>		xxx
b. “Untuk mencatat pendapatan investasi yang diperoleh dari investasi sementara atas dana <i>specific debt</i> yang belum digunakan”		
<i>Cash</i>	xxx	
<i>Building (Capitalized Borrowing Cost)</i>		xxx

2.4 Current Ratio

Current Ratio (CR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang diharapkan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Kreditur jangka pendek seperti bankir dan pemasok sangat tertarik untuk menilai likuiditas” (Weygandt & Kimmel, 2022). Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “rasio-rasio untuk mengukur likuiditas perusahaan meliputi rasio lancar, rasio cepat bayar, perputaran piutang, dan perputaran persediaan”.

1. “*Current ratio*”

“Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar”.

2. “*Acid-test ratio*”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan, dihitung dengan membagi jumlah kas, investasi jangka pendek, dan piutang bersih dengan kewajiban lancar”.

3. “*Accounts receivable turnover*”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas piutang usaha, dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang usaha bersih”.

4. “*Inventory turnover*”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas persediaan, dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan”.

Menurut Adwimurti et al. (2023), “*Current Ratio* memberikan gambaran tentang likuiditas perusahaan dan sejauh mana perusahaan dapat melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun, memiliki *Current Ratio* yang sangat tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan tidak memaksimalkan potensi pengembalian dari aset yang dimilikinya”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “*Current Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.”

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

CR : *Current Ratio*
Current Assets : Aset lancar
Current Liabilities : Kewajiban jangka pendek

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “*Current assets* adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Lima item utama yang terdapat di bagian aset lancar, meliputi:”

a. “*Inventories*”

“Penyajian persediaan yang tepat adalah perusahaan mengungkapkan dasar penilaian (misalnya nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih) dan asumsi arus biaya yang digunakan (misalnya FIFO atau *average-cost*). Persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Harga perolehan terdiri dari semua biaya

pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini, dikurangi penyisihan *vendor* yang diatribusikan pada persediaan. Harga perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode FIFO atau metode *average-cost*, tergantung pada sifat atau penggunaannya. Untuk persediaan tertentu, harga perolehan diukur menggunakan metode eceran, di mana nilai penjualan persediaan dikurangi dengan persentase margin kotor yang sesuai. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya pemasaran, distribusi, dan penjualan”.

b. *“Prepaid expenses”*

“Suatu perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka ke dalam aset lancar jika perusahaan tersebut akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam waktu satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama”.

c. *“Receivables”*

“Suatu perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi setiap kerugian yang diantisipasi akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat piutang non-perdagangan, dan piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikan piutang tersebut secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali jika penagihan diharapkan dalam waktu satu tahun”.

d. *“Short-term investments”*

“Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan (baik utang maupun ekuitas) sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan investasi non-perdagangan perorangan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada situasinya. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk diperdagangkan pada biaya perolehan diamortisasi”.

e. *“Cash and cash equivalents”*

“Kas umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan simpanan giro (uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan istilah kas dan setara kas dan menyatakan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar”.

Menurut Kieso et al. (2024), “*current liabilities* adalah kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau satu tahun yang lebih lama. *Current liabilities* (kewajiban jangka pendek) meliputi:”

1. “*Accounts payable*”

“*Accounts payable* adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli secara kredit. Utang dagang timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak milik atas aset dan pembayarannya”.

2. “*Notes payable*”

“*Notes payable* adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Utang wesel dapat timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya”.

3. “*Current maturities of long-term debt*”

“*Current maturities of long-term debt* adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam kurang dari satu tahun”.

4. “*Short-term obligations expected to be refinanced*”

“*Short-term obligations expected to be refinanced* adalah utang yang dijadwalkan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya”.

5. “*Dividends payable*”

“*Dividends payable* adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan

pemegang saham pada posisi kreditur sebesar jumlah dividen yang diumumkan”.

6. “*Customer advances and deposits*”

“*Customer advances and deposits* adalah sejumlah uang yang diterima dari pelanggan dan karyawan sebagai jaminan yang sewaktu-waktu dapat dikembalikan”.

7. “*Unearned revenue*”

“*Unearned revenue* adalah penerimaan dari pelanggan sebelum pihak penjual melaksanakan kewajibannya”.

8. “*Sales and value-added taxes payable*”

“*Sales and value-added taxes payable* adalah pajak yang terutang dan harus disetorkan atas transaksi penjualan”.

9. “*Income taxes payable*”

“*Income taxes payable* adalah pajak penghasilan dalam siklus normal operasi perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan”.

10. “*Employee-related liabilities*”

“*Employee-related liabilities* jumlah yang terutang kepada karyawan berupa gaji atau upah pada akhir periode akuntansi yang dilaporkan sebagai *current liabilities*. Selain itu, *current liabilities* yang terkait dengan kompensasi karyawan, seperti potongan gaji, absensi berbayar, dan bonus”.

Hasil penelitian Fitrilia & Nilwan (2025) menyatakan bahwa, “semakin tinggi CR, semakin besar kemampuan perusahaan untuk mengelola likuiditasnya, yang berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik dapat menghindari krisis keuangan jangka pendek dan memanfaatkan peluang investasi yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini, perusahaan dengan CR tinggi akan lebih mudah menjalankan aktivitas operasionalnya tanpa harus terhambat oleh masalah likuiditas”. Hasil dari penelitian tersebut juga menyatakan bahwa “*Current Ratio (CR)* terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*”. Namun, hasil penelitian Lumbantobing et al. (2023), menyatakan bahwa “*Current Ratio (CR)*

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*". Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut:

Ha₁: *Current Ratio (CR)* berpengaruh positif terhadap *Net Profit Margin (NPM)*

2.5 *Debt to Equity Ratio*

"*Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio keuangan yang mengukur sejauh mana penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan. DER mencerminkan tingkat *leverage* atau pembiayaan perusahaan yang bersumber dari utang" (Khairunnisa et al., 2024). Menurut Sari (2021) dalam Damanik et al. (2024), "*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar yang akan menyebabkan semakin tinggi resiko yang dialami perusahaan". Namun sebaliknya, menurut Lestiningih et al. (2021), "DER yang rendah menunjukkan semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva".

Menurut Miller-Nobles & Mattison (2022), "rumus DER dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:"

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Total Liabilities : Total utang atau liabilitas perusahaan

Total Equity : Total ekuitas perusahaan

Menurut Kieso et al. (2024), "*liabilities* merupakan kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. *Liabilities* diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. Kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) merupakan kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normalnya atau satu tahun yang lebih lama. Sedangkan, kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) adalah kewajiban yang secara wajar tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi normal yang lebih lama".

Dalam Kieso et al. (2024), "item-item dalam *current liabilities* (kewajiban lancar) meliputi:"

1. "*Accounts payable*"
2. "*Notes payable*"
3. "*Current maturities of long-term debt*"
4. "*Short-term obligations expected to be refinanced*"
5. "*Dividends payable*"
6. "*Customer advances and deposits*"
7. "*Unearned revenue*"
8. "*Sales and value-added taxes payable*"
9. "*Income taxes payable*"
10. "*Employee-related liabilities*"

Dalam Weygandt & Kimmel (2022), "item-item dalam *non-current liabilities* (kewajiban jangka panjang) meliputi:"

1. "*Bonds*"
"*Bonds* (obligasi) merupakan bentuk surat utang berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut meminjam uang. Orang yang membeli obligasi (pemegang obligasi) yang meminjamkan uang".

2. *“Long-term notes payable”*

“Jenis kewajiban jangka panjang lainnya adalah wesel bayar. Wesel bayar jangka panjang mirip dengan wesel bayar berbunga jangka pendek, kecuali jangka waktu wesel tersebut melebihi satu tahun”.

3. *“Lease liabilities”*

“Sewa adalah perjanjian kontraktual antara pemberi sewa (pemilik properti/ *lessor*) dan penyewa (penyewa properti/ *lessee*) di mana penyewa (*lessee*) memiliki hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh pemberi sewa (*lessor*) untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti tersebut, penyewa melakukan pembayaran sewa selama jangka waktu sewa kepada pemberi sewa”.

“Equity merupakan kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya” (Kieso et al., 2024). Menurut Kieso et al. (2024), “item-item yang termasuk dalam *equity* meliputi:”

a. *“Share capital”*

“Nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa (kadang-kadang disebut sebagai saham umum) dan saham preferensi (kadang-kadang disebut sebagai saham preferen)”.

b. *“Share premium”*

“Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan”.

c. *“Retained earnings”*

“Laba perusahaan yang belum didistribusikan”.

d. *“Accumulated other comprehensive income”*

“Jumlah total dari pos-pos pendapatan komprehensif lainnya”.

e. *“Treasury shares”*

“Secara umum, jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.

f. *“Non-controlling interest”*

“Sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

“Secara umum, laporan keuangan sektor *Properties & Real Estate* memiliki beberapa akun khusus yang terdapat dalam kelompok liabilitas, yaitu:”

1. “Uang jaminan penyewa (*tenants deposits*)”

“Akun ini merupakan uang jaminan penyewa pusat niaga yang akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa dengan persyaratan tertentu” (Laporan Keuangan PT Ciputra Development Tbk., 2022).

2. “Kontrak liabilitas”

“Biaya keanggotaan yang belum diamortisasi terkait dengan pusat kebugaran hotel dan biaya keanggotaan di restoran, dan bar hotel” (Laporan Keuangan PT Plaza Indonesia Realty Tbk., 2022).

3. “Provisi untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan dan pendidikan”

“Penyisihan untuk penggantian peralatan operasional hotel serta kesejahteraan karyawan dan pendidikan didasarkan atas persentase tertentu dari penerimaan jasa pelayanan (*service charge*) hotel pada operasi tahun berjalan. Penggantian peralatan yang hilang dan rusak serta realisasi pembayaran untuk kesejahteraan karyawan dan pendidikan dibukukan sebagai pengurang dari akun penyisihan tersebut” (Laporan Keuangan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk., 2022).

Berdasarkan PSAK 237, “provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui jika: (1) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; (2) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; serta (3) Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Jumlah provisi yang diakui merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang terkait. Dalam menentukan estimasi terbaik, entitas harus mempertimbangkan beberapa hal seperti:”

a. “Risiko dan ketidakpastian”

“Risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penetapan risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai kewajiban yang diukur. Entitas harus berhati-hati dan menghindarkan duplikasi perhitungan risiko dan ketidakpastian yang berakibat pada provisi yang terlalu besar”.

b. “Nilai kini”

“Provisi yang melibatkan pengeluaran uang yang timbul segera setelah periode pelaporan lebih memberatkan bila dibandingkan dengan kewajiban diestimasi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah sama yang timbul kemudian. Dengan demikian, jika dampaknya bersifat material, kewajiban diestimasi didiskontokan”.

c. “Peristiwa masa datang”

“Dalam menentukan jumlah provisi, entitas perlu mempertimbangkan peristiwa masa datang yang diperkirakan akan terjadi. Contohnya, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang pada masa datang. Jumlah biaya yang diakui mencerminkan perkiraan pendapat ahli yang objektif dan mempunyai kualifikasi teknis dengan mempertimbangkan bukti yang ada mengenai teknologi yang akan tersedia pada saat”.

d. “Rencana pelepasan aset”

“Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung suatu provisi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Sebaliknya, entitas mengakui keuntungan rencana pelepasan aset pada saat yang ditentukan oleh standar yang mengatur aset tersebut”.

Menurut Kieso et al. (2024), “perusahaan hanya mencatat beban dan kewajiban terkait untuk cadangan jika tiga kondisi berikut terpenuhi:”

1. “Perusahaan memiliki kewajiban saat ini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;”
2. “Ada kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan”
3. “Estimasi yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban tersebut”.

“Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, tidak ada cadangan yang diakui. Dalam menerapkan kondisi pertama, peristiwa masa lalu (sering disebut sebagai peristiwa kewajiban masa lalu) harus telah terjadi. Dalam menerapkan kondisi kedua, istilah kemungkinan didefinisikan sebagai "lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi". Frasa ini diartikan bahwa probabilitas terjadinya lebih besar dari 50%. Jika probabilitasnya 50% atau kurang, cadangan tidak diakui”.

Hasil penelitian Fitrilia & Nilwan (2025), menyatakan bahwa, “*Debt to Equity Ratio (DER)* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang daripada ekuitas untuk pembiayaan operasionalnya. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung memiliki beban bunga yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi profitabilitas. Biaya bunga yang tinggi mengurangi laba bersih yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga menurunkan *Net Profit Margin (NPM)*. Dalam hal ini, DER yang tinggi dapat menjadi indikator risiko keuangan yang lebih tinggi, di mana semakin besar porsi utang yang digunakan, semakin besar beban yang harus ditanggung perusahaan”. Hasil dari penelitian tersebut juga menyatakan bahwa “*Debt to Equity (DER)* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*”. Namun, hasil penelitian Khairunnisa et al. (2024), menyatakan bahwa, “*Debt to Equity Ratio (DER)* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Net Profit Margin (NPM)*”. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut:

H_{a2}: *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap terhadap *Net Profit Margin (NPM)*

2.6 Firm Size

Menurut Hery (2017) dalam Reza F et al. (2023), "*Firm Size* merupakan sebuah metode pengukuran yang dapat dilakukan oleh banyak pihak untuk menilai atau mengukur sejauh mana atau seberapa besar kekayaan yang bersumber dari penggunaan aktiva. Diketahui bahwa dalam mengukur kekayaan atau ukuran sebuah perusahaan ialah dengan melihat *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya akan dapat diketahui seberapa besar ukuran perusahaan di mata pihak luar. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan".

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Pasal 1, "klasifikasi emiten berdasarkan total aset, yaitu:"

1. "Emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:"
 - a. "Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000; dan"
 - b. "Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:"
 - 1) "Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau"
 - 2) "Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000".
2. "Emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:"
 - a. "Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000 sampai dengan Rp250.000.000.000; dan"
 - b. "Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:"
 - 1) "Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau"
 - 2) "Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000".

Menurut Herman et al. (2023), “*Firm Size* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:”

$$Size = Ln (Total Asset) \quad (2.4)$$

Keterangan:

Size : Ukuran perusahaan

Ln : Natural logaritma

Total Asset : Total harta yang dimiliki oleh perusahaan

“*Asset* merupakan sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi” (Kieso et al., 2024). Menurut Kieso et al. (2024), “aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:”

1. “*Current assets*”

“Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Lima item utama yang terdapat di bagian aset lancar, meliputi:”

- a. “*Inventories*”
- b. “*Prepaid expenses*”
- c. “*Receivables*”
- d. “*Short-term investments*”
- e. “*Cash and cash equivalents*”

2. “*Non-current assets*”

“Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset tidak lancar mencakup berbagai macam barang seperti:”

a. “*Investments*”

“Investasi jangka panjang, yang sering disebut sebagai investasi saja, biasanya terdiri dari salah satu dari empat jenis:”

- I. “Investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang”.
 - II. “Investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi”.
 - III. “Investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik”.
 - IV. “Investasi dalam anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang tidak terkonsolidasi”.
- b. *“Property, plant, and equipment”*
- “Property, plant, and equipment* adalah aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi bisnis secara rutin. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya yang mudah terkuras (mineral). Selain tanah, perusahaan dapat mendepresiasi (misalnya bangunan) atau mengurangi (misalnya cadangan minyak) aset-aset ini”.
- c. *“Intangible assets”*
- “Aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi ini meliputi paten, hak cipta, *franchise*, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapus (mengamortisasi) aset tak berwujud berumur terbatas selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa berlaku hukum atau masa manfaatnya. Perusahaan secara berkala menilai aset tak berwujud berumur tak terbatas (seperti nama dagang tertentu) untuk penurunan nilai (*impairment*)”.
- d. *“Other assets”*
- “Item-item yang termasuk dalam bagian ini di antaranya mencakup item seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tak lancar. Item lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi”.

“Secara umum, laporan keuangan sektor *Properties & Real Estate* memiliki beberapa akun khusus yang terdapat dalam kelompok aset, yaitu:”

1. “Persediaan *real estate* (*inventories real estate*)”

“Persediaan *real estate*, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah” (Laporan Keuangan PT Makmur Berkah Armada Tbk., 2022).

2. “Properti investasi (*investment property*)”

Berdasarkan PSAK 240, “properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga-harga pembelian dan setiap pengeluaran yang diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut” (Laporan Keuangan PT Adhi Commuter Properti Tbk., 2022).

3. “Tanah yang belum dikembangkan (*land for development*)”

“Tanah yang belum dikembangkan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan

tanah ditambah biaya pinjaman dan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pematangan tanah akan dimulai” (Laporan Keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk., 2022).

4. “Konstruksi dalam pengerjaan (*construction in progress*)”

“Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk biaya perolehan tanah dan akumulasi biaya pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan meliputi pembangunan yang diperuntukan untuk menjadi persediaan, aset tetap atau properti investasi pada saat penyelesaiannya dan pembangunan yang belum dapat ditentukan secara andal pembagian peruntukannya pada saat tanggal pelaporan. Pada saat pembangunan tersebut selesai dan siap digunakan, jumlah biaya yang terjadi direklasifikasi ke akun “Persediaan”, “Aset Tetap” atau “Properti Investasi” yang bersangkutan. Akumulasi biaya konstruksi bangunan dikapitalisasi sebagai "aset dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dibebankan pada saat aset tersebut siap untuk digunakan” (Laporan Keuangan PT Pollux Properties Indonesia Tbk., 2022).

5. “Uang muka pembelian tanah”

“Uang muka pembelian tanah merupakan pembayaran awal atas pembebasan tanah yang masih berada dalam proses pengalihan kepemilikan dari penjual kepada perusahaan. Pembayaran tersebut umumnya berkisar antara 50%–75% dari nilai transaksi dan dilakukan untuk tanah yang akan digunakan dalam pengembangan proyek atau kawasan industri” (Laporan Keuangan PT Bumi Citra Permai Tbk., 2024).

Hasil penelitian dari Gaol et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Net Profit Margin (NPM)*. Namun berbeda dari hasil penelitian (Herman et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Net Profit Margin (NPM)*. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis ketiga yang diajukan sebagai berikut:

Ha₃: *Firm Size* berpengaruh positif terhadap terhadap *Net Profit Margin*

2.7 *Inventory Turnover*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam PSAK 202, “persediaan adalah aset:”

- a. “Dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;”
- b. “Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau”
- c. “Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”.

“Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali, termasuk sebagai contoh, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer dan dikuasai untuk dijual kembali, atau tanah dan properti lainnya yang dikuasai untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “perputaran persediaan merupakan rasio yang mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Tujuannya untuk mengukur likuiditas persediaan”. Menurut Kasmir (2014) dalam Wiwitanti et al. (2022), “perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang dihasilkan dalam persediaan akan berputar dalam satu periode atau seberapa lama (dalam hari) rata-rata persediaan tersimpan digudang hingga akhirnya terjual”. Menurut Raharjaputra (2011) dalam Wiwitanti et al. (2022), “apabila tingkat perputaran persediaan semakin tinggi maka kemungkinan semakin besar pula perusahaan akan memperoleh laba, begitu sebaliknya jika tingkat perputaran persediaan rendah maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan mendapatkan laba”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “rumus yang digunakan untuk menghitung *Inventory Turnover*, yaitu:”

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Cost of Goods Sold : Harga Pokok Penjualan

Average Inventory : Total persediaan tahun t ditambah dengan total persediaan t-1 lalu dibagi dua

“*Cost of goods sold* adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Beban ini berhubungan langsung dengan pendapatan yang diakui dari penjualan barang” (Weygandt & Kimmel, 2022). Menurut Kieso et al. (2024), “persediaan (*inventory*) adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat”.

“Dalam mencatat persediaannya, terdapat 2 (dua) sistem pencatatan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu:” (Kieso et al., 2024)

1. “*Perpetual system*”

“Sistem persediaan perpetual secara terus-menerus melacak perubahan dalam akun Persediaan. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang secara langsung di akun Persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut:”

- a. “Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebit ke Persediaan, bukan ke Pembelian”.
- b. “Biaya pengiriman masuk didebit ke Persediaan, bukan ke Pembelian. Retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke Persediaan, bukan ke akun terpisah”.

- c. “Harga pokok penjualan dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit Harga Pokok Penjualan dan mengkredit Persediaan”.
- d. ”Buku besar pembantu untuk catatan persediaan individual dipelihara sebagai langkah pengendalian. Catatan pembantu menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada”.

“Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan berkelanjutan tentang saldo di akun Persediaan dan akun Harga Pokok Penjualan”.

2. “*Periodic system*”

“Dalam sistem persediaan periodik, perusahaan hanya menentukan jumlah persediaan yang ada secara periodik. Perusahaan mencatat semua perolehan persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun Pembelian. Kemudian, perusahaan menambahkan total dalam akun Pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang ada pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung biaya barang yang terjual, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari biaya barang yang tersedia untuk dijual. Perlu dicatat bahwa dalam sistem persediaan periodik, biaya barang yang terjual adalah jumlah sisa yang bergantung pada penghitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai “*stock opname*”. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan penghitungan fisik persediaan setidaknya sekali setahun”.

Menurut Weygandt & Kimmel (2022), “dalam sistem periodik, terdapat dua metode dalam menghitung estimasi *inventory*, yaitu:”

1. “*Gross profit method*”

“Metode laba kotor memperkirakan biaya persediaan akhir dengan menerapkan tingkat laba kotor pada penjualan bersih. Metode ini relatif sederhana namun efektif. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode laba kotor untuk menguji kewajaran jumlah persediaan akhir. Metode ini dapat mendeteksi kesalahan besar. Untuk

menggunakan metode ini, perusahaan perlu mengetahui penjualan bersihnya, biaya barang yang tersedia untuk dijual, dan tingkat laba kotornya. Perusahaan kemudian dapat memperkirakan laba kotornya untuk periode tersebut”.

2. “*Retail inventory method*”

“Sebagian besar perusahaan ritel dapat menetapkan hubungan antara biaya dan harga jual. Perusahaan kemudian menerapkan persentase biaya terhadap harga ritel pada persediaan akhir dengan harga ritel untuk menentukan persediaan berdasarkan biaya. Berdasarkan metode persediaan ritel, catatan perusahaan harus menunjukkan baik biaya maupun nilai ritel barang yang tersedia untuk dijual”.

Menurut Kieso et al., (2024), “terdapat 2 metode dalam menetapkan biaya persediaan, yaitu:”

1. “*First-in, first-out (FIFO) method*”

“Metode *first-in, first-out (FIFO)* mengasumsikan bahwa suatu perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (pada perusahaan manufaktur) atau barang pertama yang dijual (pada perusahaan perdagangan). Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru”.

2. “*Average-cost method*”

“Metode biaya rata-rata menetapkan harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut”.

Menurut Datar & Rajan (2021), “terdapat berbagai tipe biaya yang berbeda yang terkait dengan persediaan selain biaya aktual pembelian barang. Biaya terkait *inventory* dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:”

1. “Biaya pembelian (*purchasing costs*) adalah biaya barang yang diperoleh dari pemasok, termasuk biaya pengiriman masuk. Biaya ini biasanya

merupakan kategori biaya terbesar dari barang dalam persediaan. Diskon untuk ukuran pesanan pembelian yang besar dan persyaratan pembayaran pemasok yang lebih cepat mengurangi biaya pembelian”.

2. “Biaya pemesanan (*ordering costs*) adalah biaya untuk menyiapkan dan menerbitkan pesanan pembelian, menerima dan memeriksa barang yang termasuk dalam pesanan, dan mencocokkan faktur yang diterima, pesanan pembelian, dan catatan pengiriman untuk melakukan pembayaran. Biaya pemesanan termasuk biaya untuk mendapatkan persetujuan pembelian, serta biaya pemrosesan khusus lainnya”.
3. “Biaya penyimpanan (*carrying costs*) adalah biaya yang timbul saat barang disimpan dalam persediaan. Biaya penyimpanan meliputi biaya peluang investasi yang terikat dalam persediaan dan biaya yang terkait dengan penyimpanan, seperti sewa ruang, asuransi, dan keusangan”.
4. “Biaya kekurangan stok (*stockout costs*) adalah biaya yang timbul ketika suatu perusahaan kehabisan barang tertentu yang diminati pelanggan, atau kekurangan stok. Perusahaan harus bertindak cepat untuk mengisi kembali persediaan guna memenuhi permintaan tersebut atau menanggung biaya karena tidak dapat memenuhinya. Perusahaan dapat menanggapi kekurangan stok dengan mempercepat pesanan dari pemasok, yang dapat menjadi mahal karena biaya pemesanan dan manufaktur tambahan ditambah biaya transportasi terkait. Atau perusahaan dapat kehilangan penjualan karena kekurangan stok. Dalam hal ini, biaya peluang dari kekurangan stok meliputi margin kontribusi yang hilang atas penjualan yang tidak dilakukan ditambah margin kontribusi yang hilang pada penjualan di masa mendatang karena ketidakpuasan pelanggan”.
5. “Biaya kualitas (*cost of quality*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan menilai, atau yang timbul sebagai akibat dari, masalah kualitas. Masalah kualitas muncul, misalnya, karena produk rusak atau pecah atau salah penanganan saat dipindahkan masuk dan keluar gudang. Ada empat kategori biaya kualitas: Biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal”.

6. “Biaya penyusutan (*shrinkage costs*) dihasilkan dari pencurian oleh pihak luar, penggelapan oleh karyawan, dan salah klasifikasi atau salah penempatan persediaan. Penyusutan diukur dengan selisih antara (a) biaya persediaan yang tercatat dalam pembukuan (setelah mengoreksi kesalahan) dan (b) biaya persediaan saat dihitung secara fisik. Penyusutan seringkali dapat menjadi ukuran penting kinerja manajemen. Karena biaya penyusutan umumnya meningkat ketika persediaan perusahaan meningkat, sebagian besar perusahaan berusaha untuk tidak menyimpan persediaan lebih dari yang diperlukan”.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan sektor *Properties & Real Estate*, “persediaan properti yang membutuhkan waktu lama untuk terjual dapat menimbulkan *carrying cost* berupa biaya pemeliharaan dan perbaikan unit, jasa keamanan proyek, serta biaya perawatan kawasan. Biaya-biaya tersebut umumnya dicatat dalam akun beban penjualan apabila berkaitan dengan upaya menjaga kondisi dan daya tarik unit properti yang masih dipasarkan kepada pelanggan. Dengan demikian, semakin lama persediaan properti terjual, maka semakin besar *carrying cost* yang dapat timbul dan memengaruhi laporan laba rugi perusahaan properti dan real estat”.

Hasil penelitian Wiwitanti et al. (2022) menyatakan bahwa, “*Net Profit Margin (NPM)* akan meningkat apabila perputaran persediaan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka semakin besar kemungkinan dalam memperoleh *Net Profit Margin*. Hasil dari penelitian tersebut juga menyatakan bahwa, “*Inventory Turnover (ITO)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*”. Namun, hasil penelitian Sulistiono & Nur (2023), menyatakan bahwa “*Inventory Turnover (ITO)* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*”. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis keempat yang diajukan sebagai berikut:

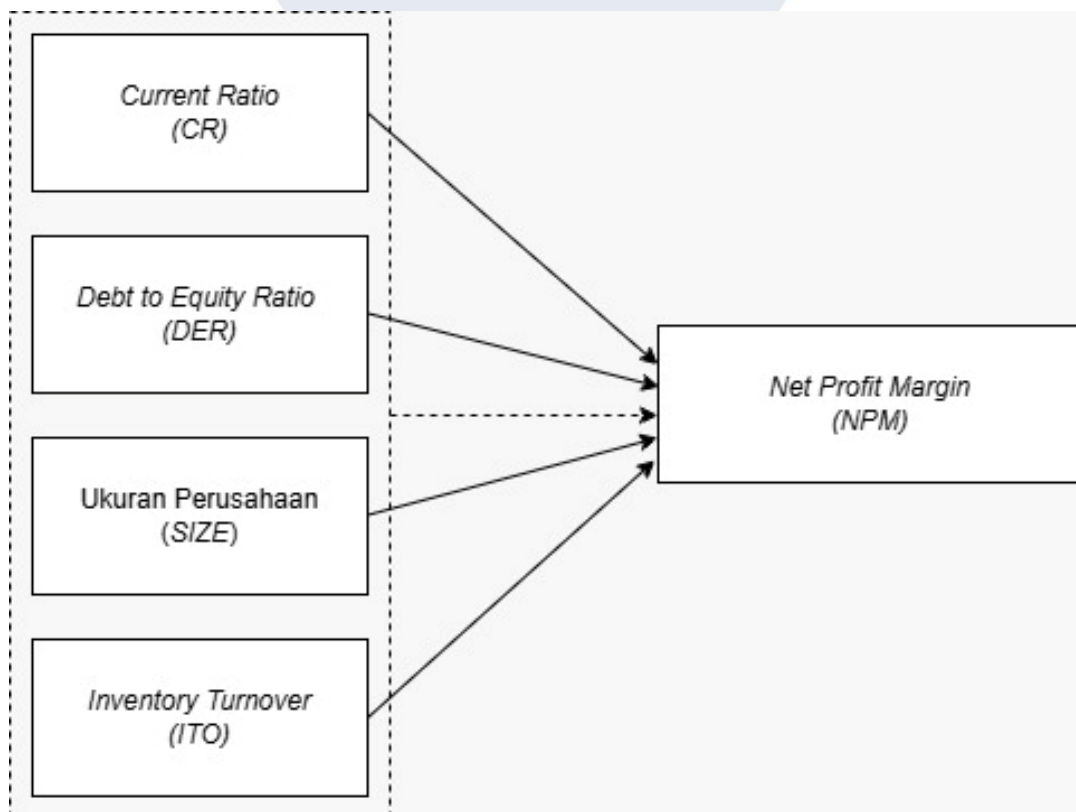
Ha4: *Inventory Turnover (ITO)* berpengaruh positif terhadap terhadap *Net Profit Margin (NPM)*

2.8 Pengaruh Simultan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji *pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Firm Size, dan Inventory Turnover terhadap Net Profit Margin*. Hasil penelitian dari Nafisah et al. (2025) menyatakan bahwa, “secara simultan *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh dan signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)*”. Hasil penelitian lainnya dari Nuryani (2023) juga menyatakan bahwa, “*Inventory Turnover (ITO), Total Asset Turnover (TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER)* secara simultan berpengaruh signifikan pada NPM”. Selain itu, hasil penelitian (Gaol et al., 2021) menunjukkan bahwa, “secara simultan *Receivable Turnover, DAR, Current Ratio dan Firm Size* berpengaruh terhadap *Net Profit Margin*”.

2.9 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.4 Model Penelitian